

Analisis Penggunaan PayLater dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Literatur

Siti Sofa Nurjamala
Jurusan Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Al Bahjah Cirebon
Email : sitisofanurjamala@students.staialbahjah.ac.id

Abstrak:

Perkembangan teknologi digital dalam sektor keuangan telah menghadirkan berbagai layanan finansial modern, salah satunya adalah layanan PayLater. Sistem PayLater memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan transaksi dengan metode pembayaran tunda atau cicilan. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul berbagai permasalahan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, terutama terkait unsur riba, bunga, denda keterlambatan, dan akad yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan PayLater dalam perspektif ekonomi Islam melalui pendekatan studi literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi literatur (library research), menggunakan sumber data berupa jurnal ilmiah, buku, fatwa, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar layanan PayLater konvensional masih mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, terutama adanya bunga dan denda keterlambatan yang termasuk kategori riba. Selain itu, penggunaan PayLater juga berpotensi mendorong perilaku konsumtif di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian bagi umat Islam dalam menggunakan layanan PayLater serta pengembangan sistem pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci: PayLater, ekonomi Islam, riba, fintech, studi literatur.

Abstract:

The development of digital technology in the financial sector has introduced various modern financial services, one of which is PayLater. The PayLater system provides convenience for people to conduct transactions using deferred payment or installment methods. However, behind this convenience, several issues arise related to the principles of Islamic Economics, especially concerning usury (riba), interest, late payment penalties, and the contracts used in the transactions. This study aims to analyze the use of PayLater from the perspective of Islamic economics through a literature study approach. The research method used is qualitative research with a literature study (library research) design, utilizing data sources from scientific journals, books, fatwas, and articles relevant to the research topic. The results of the study indicate that most conventional PayLater services still contain elements that contradict sharia principles, particularly the existence of interest and late payment penalties categorized as riba. In addition, the use of PayLater has the potential to encourage consumptive behavior among society. Therefore, Muslims need to be cautious in using PayLater services, and there is a need to develop digital payment systems that comply with sharia principles.

Keywords: PayLater, Islamic economics, riba, fintech, literature study.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada sektor ekonomi dan keuangan. Digitalisasi ekonomi mendorong munculnya berbagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi atau financial

technology (fintech). Kehadiran fintech memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas keuangan secara cepat, praktis, dan efisien, seperti pembayaran, transfer dana, investasi, hingga pinjaman secara daring melalui telepon genggam. Perkembangan fintech di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring meningkatnya penggunaan internet dan smartphone di kalangan Masyarakat (Widodo & Haq, 2024).

Perkembangan fintech di Indonesia juga didukung oleh tingginya penggunaan teknologi digital, khususnya di kalangan generasi Z dan milenial. Generasi tersebut dikenal sebagai kelompok masyarakat yang terbiasa menggunakan layanan digital dan menginginkan segala sesuatu dilakukan secara instan serta praktis (Febriyanti et al., 2025). Pola hidup modern yang serba cepat menyebabkan masyarakat lebih memilih metode pembayaran non-tunai dibandingkan transaksi konvensional. Kondisi tersebut mendorong perusahaan fintech untuk menghadirkan berbagai layanan pembayaran digital yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Salah satu layanan fintech yang saat ini berkembang pesat adalah PayLater. PayLater merupakan layanan pembayaran digital yang memungkinkan pengguna membeli barang atau jasa terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran pada waktu tertentu melalui sistem cicilan atau pembayaran tertunda. Berbagai platform e-commerce di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, dan Traveloka menyediakan fitur PayLater sebagai strategi untuk meningkatkan transaksi dan menarik minat konsumen. Kemudahan proses pendaftaran, pencairan limit yang cepat, serta persyaratan penggunaan yang relatif mudah menjadikan layanan ini semakin populer di kalangan

masyarakat, terutama mahasiswa dan generasi muda (Cintya & Nisa, 2024).

Popularitas PayLater juga dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas belanja online melalui platform e-commerce. Pengguna dapat membeli berbagai kebutuhan tanpa harus memiliki dana secara langsung pada saat transaksi dilakukan. Kemudahan tersebut secara tidak langsung mendorong masyarakat melakukan konsumsi secara berlebihan. Penggunaan PayLater yang tidak disertai dengan pengelolaan keuangan yang baik dapat menimbulkan perilaku konsumtif bahkan menyebabkan permasalahan utang di kalangan Masyarakat (Muslih et al., 2025). Oleh karena itu, penggunaan PayLater perlu dikaji lebih mendalam agar masyarakat dapat memahami dampak positif maupun negatif dari layanan tersebut .

Di sisi lain, penggunaan PayLater juga menimbulkan berbagai persoalan apabila ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam. Sebagian besar layanan PayLater konvensional menerapkan bunga, biaya tambahan, dan denda keterlambatan pembayaran yang berpotensi mengandung unsur riba. Dalam ajaran Islam, praktik riba dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi (Miranda & Nuryana, 2026). Larangan riba dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menunjukkan bahwa umat Islam diwajibkan menghindari transaksi yang mengandung unsur riba dalam aktivitas ekonomi.

Selain persoalan riba, akad yang digunakan dalam layanan PayLater juga menjadi perhatian dalam kajian Ekonomi Islam. Banyak pengguna layanan PayLater belum memahami secara jelas akad, ketentuan pembayaran,

maupun konsekuensi denda yang diterapkan oleh penyedia layanan. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai akad dalam transaksi digital berpotensi menimbulkan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (Julita et al., 2022). Oleh sebab itu, penting dilakukan kajian terhadap mekanisme dan sistem yang digunakan dalam layanan PayLater guna mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas perkembangan fintech dan penggunaan layanan PayLater di Indonesia. Penelitian tersebut umumnya berfokus pada pengaruh PayLater terhadap perilaku konsumtif masyarakat, minat penggunaan layanan digital, serta dampaknya terhadap gaya hidup generasi muda (Sari et al., 2025). Selain itu, terdapat pula penelitian yang membahas fintech dalam perspektif syariah secara umum. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis penggunaan PayLater berdasarkan perspektif Ekonomi Islam melalui pendekatan studi literatur masih terbatas. Sebagian penelitian lebih banyak menitikberatkan pada aspek ekonomi dan teknologi dibandingkan kajian hukum Islam terkait akad, bunga, gharar, dan unsur riba dalam layanan PayLater .

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap yang menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam mengenai penggunaan PayLater dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan memfokuskan analisis pada penggunaan PayLater berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam melalui kajian literatur terhadap aspek akad, riba, gharar, serta dampak perilaku konsumtif dalam transaksi digital modern. Penelitian ini penting dilakukan mengingat perkembangan layanan keuangan digital terus meningkat, sementara

pemahaman masyarakat mengenai kesesuaian layanan tersebut dengan prinsip syariah masih relatif rendah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan PayLater dalam perspektif Ekonomi Islam melalui pendekatan studi literatur. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum dan mekanisme penggunaan PayLater berdasarkan prinsip syariah serta menjadi bahan pertimbangan dalam menggunakan layanan keuangan digital secara bijak dan sesuai dengan ajaran Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (library research). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena penggunaan layanan PayLater berdasarkan perspektif Ekonomi Islam melalui kajian terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, memahami, serta menelaah berbagai referensi ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, penulis tidak melakukan penelitian lapangan, observasi, maupun penyebaran angket, melainkan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan sebagai data utama penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel, skripsi, fatwa, dan berbagai literatur lain yang relevan dengan pembahasan mengenai PayLater dalam perspektif Ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan larangan riba,

akad, dan prinsip transaksi syariah. Referensi yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian serta memiliki keterkaitan dengan perkembangan fintech dan sistem pembayaran digital modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan penelusuran pustaka. Peneliti mengumpulkan berbagai sumber yang membahas perkembangan financial technology (fintech), mekanisme layanan PayLater, konsep riba, gharar, akad dalam Islam, serta pandangan ulama mengenai transaksi digital. Selanjutnya, sumber-sumber tersebut diklasifikasikan dan dipilih berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan tema penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan memfokuskan informasi yang berkaitan dengan penggunaan PayLater dalam perspektif Ekonomi Islam. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya mengenai riba, gharar, akad, dan perilaku konsumtif dalam transaksi digital. Melalui metode penelitian ini, penulis berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penggunaan PayLater berdasarkan perspektif Ekonomi Islam serta menjelaskan unsur-unsur yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah dalam praktik transaksi digital modern.

C. Pembahasan

1. Perkembangan Fintech dan Popularitas PayLater

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem transaksi keuangan di Indonesia (OJK, 2024). Kemajuan internet, penggunaan smartphone, dan pertumbuhan e-commerce mendorong lahirnya berbagai inovasi financial technology (fintech) yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi secara cepat dan praktis (Aisyah et al., 2023). Fintech merupakan perpaduan antara jasa keuangan dan teknologi yang mengubah sistem pembayaran konvensional menjadi digital, sehingga transaksi dapat dilakukan tanpa tatap muka dan tanpa menggunakan uang tunai secara langsung (Julita et al., 2022).

Di Indonesia, perkembangan fintech semakin pesat seiring meningkatnya penggunaan internet dan smartphone di kalangan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa penggunaan smartphone mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir sehingga mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja secara daring (BPS, 2024). Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Blibli juga berkembang sangat cepat karena memberikan kemudahan akses transaksi bagi konsumen maupun pelaku usaha (Muslih et al., 2025). Kehadiran marketplace tersebut memperluas sistem perdagangan digital dan mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi di Indonesia.

Perkembangan e-commerce kemudian diikuti dengan munculnya berbagai metode pembayaran digital, salah satunya adalah PayLater. Layanan PayLater hadir sebagai bentuk inovasi fintech yang menawarkan konsep “beli sekarang, bayar nanti” (buy now pay later) (Miranda & Nuryana, 2026). Sistem ini memungkinkan pengguna

membeli barang atau jasa terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran secara cicilan sesuai tenor yang dipilih. Popularitas PayLater semakin meningkat karena dianggap lebih praktis dibandingkan kartu kredit konvensional, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses kartu kredit bank (Cintya & Nisa, 2024).

Fenomena PayLater juga tidak dapat dipisahkan dari gaya hidup generasi muda, khususnya generasi Z dan milenial. Generasi ini hidup di tengah perkembangan teknologi digital sehingga sangat dekat dengan budaya transaksi online dan penggunaan aplikasi digital (Widodo & Haq, 2024). Kemudahan akses PayLater, proses pendaftaran yang cepat, serta banyaknya promo diskon dan cashback membuat layanan ini menjadi sangat diminati oleh generasi muda (Sari et al., 2025). Selain itu, adanya dorongan untuk mengikuti gaya hidup modern dan tren konsumsi digital menyebabkan PayLater semakin populer di kalangan anak muda.

Kemudahan transaksi digital melalui PayLater juga didukung oleh berkembangnya sistem pembayaran elektronik dalam e-commerce. Berbagai platform besar seperti Shopee, Tokopedia, Traveloka, Gojek, Kredivo, dan Akulaku menyediakan fitur PayLater untuk mendukung kebutuhan transaksi masyarakat secara instan. Sistem ini memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan tanpa harus menunggu dana tersedia terlebih dahulu sehingga dianggap sebagai solusi pembayaran modern yang fleksibel dan efisien (Febriyanthi et al., 2025). Namun demikian, perkembangan PayLater juga memunculkan berbagai persoalan, terutama terkait perilaku konsumtif dan kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam.

2. Mekanisme Penggunaan PayLater

PayLater merupakan metode pembayaran digital yang memungkinkan pengguna membeli barang atau jasa terlebih dahulu, kemudian membayarnya di kemudian hari sesuai dengan jangka waktu atau tenor yang telah dipilih (Cintya & Nisa, 2024). Sistem ini banyak digunakan pada platform e-commerce dan marketplace karena dianggap lebih praktis dibandingkan penggunaan kartu kredit konvensional (Widodo & Haq, 2024). Pada dasarnya, PayLater bekerja dengan sistem buy now, pay later atau “beli sekarang, bayar nanti”, di mana perusahaan penyedia layanan terlebih dahulu menalangi pembayaran konsumen kepada merchant, kemudian pengguna membayar tagihan tersebut kepada pihak penyedia PayLater (Triyana et al., 2024).

Mekanisme penggunaan PayLater dimulai dari proses pendaftaran akun oleh pengguna. Untuk memperoleh layanan ini, pengguna diwajibkan mengisi data pribadi seperti foto diri, foto KTP, dan formulir identitas secara online (OJK, 2024). Selain itu, beberapa platform juga meminta dokumen tambahan seperti NPWP dan bukti pendukung lainnya sebagai syarat verifikasi akun. Setelah proses verifikasi selesai, pengguna akan memperoleh limit kredit tertentu yang dapat digunakan untuk bertransaksi sesuai kemampuan dan hasil penilaian kredit dari perusahaan penyedia layanan (Koswara et al., 2025).

Dalam praktiknya, PayLater menyediakan beberapa pilihan cicilan atau tenor pembayaran. Pengguna dapat memilih pembayaran dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan hingga 12 bulan sesuai dengan kebijakan masing-masing platform. Semakin panjang tenor yang dipilih, maka jumlah cicilan yang harus

dibayarkan setiap bulan akan semakin ringan, namun total pembayaran biasanya menjadi lebih besar karena adanya tambahan bunga dan biaya layanan (Julita et al., 2022). Hal ini menjadikan sistem PayLater mirip dengan kartu kredit digital yang memberikan kemudahan pembayaran secara bertahap.

Selain cicilan, mekanisme PayLater juga melibatkan penerapan bunga dalam setiap transaksi. Besaran bunga berbeda-beda pada setiap platform, mulai dari 0% hingga sekitar 6% tergantung kebijakan penyedia layanan dan tenor yang dipilih pengguna (Muslih et al., 2025). Dalam beberapa layanan seperti Shopee PayLater, pengguna dikenakan tambahan bunga sekitar 2,95% setiap bulan pada transaksi cicilan. Tambahan bunga tersebut menjadi keuntungan bagi perusahaan penyedia layanan sekaligus menjadi kewajiban tambahan yang harus dibayarkan pengguna di luar harga pokok barang (Sari et al., 2025).

Selain bunga, pengguna PayLater juga dapat dikenakan denda apabila terlambat melakukan pembayaran tagihan. Denda keterlambatan umumnya ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari total tagihan yang belum dibayarkan (Aisyah et al., 2023). Dalam layanan Shopee PayLater misalnya, pengguna dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan apabila melewati jatuh tempo pembayaran. Ketentuan denda ini biasanya telah dicantumkan dalam syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi yang harus disetujui pengguna sebelum menggunakan layanan PayLater.

Kemudahan proses transaksi, persyaratan yang ringan, serta pencairan limit kredit yang cepat menjadikan PayLater sangat diminati masyarakat, khususnya generasi muda (Miranda & Nuryana, 2026).

Namun demikian, mekanisme cicilan, bunga, dan denda dalam sistem PayLater juga menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait risiko meningkatnya perilaku konsumtif dan perdebatan hukumnya dalam perspektif ekonomi Islam.

3. Analisis PayLater dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, penggunaan PayLater perlu dianalisis berdasarkan kesesuaian akad, unsur riba, gharar, serta prinsip-prinsip syariah dalam transaksi muamalah. Islam pada dasarnya memperbolehkan aktivitas jual beli dan utang piutang selama dilakukan secara adil, transparan, dan tidak mengandung unsur yang diharamkan (Si & karim M.E, 2022). Namun, perkembangan sistem pembayaran digital seperti PayLater memunculkan perdebatan di kalangan ulama karena adanya tambahan biaya, bunga, dan denda dalam mekanisme transaksinya (Aisyah et al., 2023).

Dalam hukum Islam, PayLater umumnya dikategorikan sebagai akad qardh atau utang piutang. Akad qardh merupakan transaksi pinjaman yang mengharuskan pengembalian sejumlah dana yang sama tanpa adanya tambahan yang disyaratkan di awal akad (DSN-MUI, 2001). Pada praktik PayLater, pihak penyedia layanan terlebih dahulu menalangi pembayaran konsumen kepada merchant, kemudian pengguna wajib membayar kembali tagihan tersebut sesuai tenor yang dipilih. Dari sisi akad, beberapa penelitian menyebutkan bahwa sistem PayLater telah memenuhi unsur akad karena terdapat pihak yang bertransaksi (aqid), objek transaksi yang jelas, serta adanya ijab dan qabul dalam bentuk persetujuan digital antara pengguna dan penyedia layanan (Maharani & Darna, 2024).

Meskipun demikian, persoalan utama dalam PayLater terletak pada adanya unsur riba. Dalam Islam, riba merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang piutang dan hukumnya haram. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 275. Pada praktik PayLater, pengguna umumnya dikenakan bunga cicilan dan tambahan biaya tertentu di luar harga pokok barang (Sari et al., 2025). Tambahan bunga tersebut dipandang sebagai riba qardh karena adanya keuntungan yang disyaratkan atas pinjaman yang diberikan kepada pengguna (Muslih et al., 2025).

Selain bunga, unsur riba juga muncul pada penerapan denda keterlambatan pembayaran. Dalam beberapa layanan PayLater, pengguna dikenakan denda apabila melewati jatuh tempo pembayaran tagihan. Denda tersebut dianggap sebagai tambahan atas utang akibat penundaan pembayaran sehingga dikategorikan sebagai riba jahiliyah (Cintya & Nisa, 2024). Oleh karena itu, sebagian ulama menilai bahwa praktik PayLater yang menerapkan bunga dan denda bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam karena mengandung unsur eksploitasi dalam transaksi utang piutang.

Selain riba, analisis PayLater dalam ekonomi Islam juga berkaitan dengan unsur gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi. Gharar merupakan kondisi ketika terdapat ketidakpastian atau informasi yang tidak jelas dalam akad. Dalam praktik PayLater, gharar dapat muncul apabila pengguna tidak memahami secara rinci besaran bunga, biaya administrasi, maupun konsekuensi denda keterlambatan yang harus dibayarkan (Hayati et al.,

2025). Islam menekankan pentingnya transparansi dalam transaksi agar tidak terjadi penipuan maupun kerugian bagi salah satu pihak. Oleh sebab itu, kejelasan informasi mengenai harga, tenor, bunga, dan denda menjadi syarat penting agar transaksi sesuai dengan prinsip syariah.

Namun demikian, beberapa ulama berpendapat bahwa penggunaan PayLater masih diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kejelasan akad, transparansi harga, tidak adanya unsur penipuan, dan tidak menerapkan tambahan bunga yang memberatkan (DSN-MUI, 2021). Transaksi PayLater juga dinilai sah apabila harga barang telah ditentukan di awal transaksi dan disepakati kedua belah pihak. Akan tetapi, apabila dalam praktiknya terdapat bunga dan denda yang bersifat wajib, maka sebagian besar ulama menilai bahwa sistem tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena mengandung unsur riba yang diharamkan.

4. Dampak Konsumtif Penggunaan PayLater perilaku konsumtif

Kemunculan layanan PayLater memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, penggunaan PayLater juga menimbulkan dampak konsumtif yang cukup signifikan, terutama di kalangan generasi muda (Julita et al., 2022). Sistem “beli sekarang, bayar nanti” membuat masyarakat lebih mudah membeli barang tanpa harus memiliki dana secara langsung. Kondisi ini mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat dari konsumsi berdasarkan kebutuhan menjadi konsumsi berdasarkan keinginan (Miranda & Nuryana, 2026).

PayLater dianggap mampu meningkatkan perilaku konsumtif karena memberikan dorongan impulsif dalam

berbelanja. Kemudahan akses kredit, banyaknya promo diskon, cashback, serta proses transaksi yang cepat membuat pengguna lebih mudah tergoda membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan (Widodo & Haq, 2024). Pengguna sering kali merasa lebih ringan melakukan pembelian karena pembayaran dapat ditunda atau dicicil dalam beberapa bulan. Akibatnya, kebiasaan berbelanja menjadi semakin sulit dikendalikan dan mendorong gaya hidup konsumtif di masyarakat.

Selain meningkatkan perilaku konsumtif, PayLater juga membentuk budaya belanja instan di era digital. Kehadiran marketplace dan sistem pembayaran digital membuat masyarakat terbiasa memperoleh barang secara cepat tanpa perlu menunggu kemampuan finansial yang cukup (Muslih et al., 2025). Budaya ini semakin berkembang di kalangan generasi muda yang sangat dekat dengan teknologi dan tren belanja online. Kemudahan transaksi digital menjadikan aktivitas konsumsi tidak lagi mempertimbangkan prioritas kebutuhan, melainkan lebih didasarkan pada keinginan mengikuti gaya hidup modern dan tren sosial.

Dampak lain dari budaya belanja instan adalah munculnya beban keuangan akibat cicilan yang terus bertambah. Pengguna PayLater sering kali menggunakan lebih dari satu layanan sekaligus sehingga tagihan bulanan menjadi semakin besar. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat mengganggu stabilitas keuangan pribadi dan menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran (Sari et al., 2025). Selain itu, keterlambatan pembayaran juga menimbulkan denda tambahan yang semakin memperbesar beban utang pengguna.

Dalam perspektif Islam, perilaku konsumtif dan pemborosan merupakan perbuatan yang tidak dianjurkan. Islam mengajarkan bahwa konsumsi harus dilakukan secara seimbang dan berdasarkan kebutuhan, bukan semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu. Al-Qur'an melarang umat Islam berlebih-lebihan dalam menggunakan harta sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-A'raf ayat 31 yang menyatakan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Selain itu, QS. Al-Furqan ayat 67 juga menjelaskan pentingnya sikap moderat dalam membelanjakan harta, yaitu tidak boros dan tidak pula terlalu kikir.

Konsep konsumsi dalam ekonomi Islam menekankan prinsip kemaslahatan dan keseimbangan. Konsumsi seharusnya dilakukan sesuai kemampuan finansial agar tidak menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain (Aisyah et al., 2023). Oleh karena itu, penggunaan PayLater dalam Islam harus dilakukan secara bijak dan penuh pertimbangan agar tidak menjerumuskan seseorang pada perilaku israf (berlebihan), pemborosan, serta jeratan utang yang dapat merugikan kehidupan ekonomi di masa mendatang.

5. Pandangan Ulama dan Hukum Islam terhadap PayLater

Perkembangan layanan PayLater menimbulkan berbagai pandangan di kalangan ulama mengenai keabsahan hukumnya dalam Islam. Perbedaan pendapat tersebut muncul karena sistem PayLater memiliki unsur utang piutang, cicilan, bunga, dan denda yang perlu dikaji berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Maharani & Darna, 2024). Sebagian ulama memperbolehkan penggunaan PayLater dengan syarat tertentu, sementara sebagian

lainnya mengharamkan karena dianggap mengandung unsur riba dan gharar (Aisyah et al., 2023).

Ulama yang memperbolehkan PayLater berpendapat bahwa transaksi tersebut pada dasarnya merupakan bentuk jual beli kredit atau akad qardh yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat akad (DSN-MUI, 2001). Dalam praktiknya, PayLater dianggap sah apabila terdapat kejelasan mengenai pihak yang bertransaksi, objek transaksi, harga barang, tenor pembayaran, serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu, transaksi digital juga dinilai tetap sah meskipun tidak dilakukan secara tatap muka, karena persetujuan dapat dilakukan melalui sistem elektronik selama tidak ada unsur penipuan maupun paksaan (Triyana et al., 2024).

Namun demikian, banyak ulama yang mengkritik sistem PayLater karena adanya tambahan bunga dan denda keterlambatan pembayaran. Dalam fiqh muamalah dijelaskan bahwa setiap tambahan dalam utang piutang yang disyaratkan di awal termasuk riba dan hukumnya haram. Praktik bunga dalam PayLater dianggap sebagai riba qardh karena pengguna diwajibkan membayar lebih dari jumlah pokok pinjaman (Muslih et al., 2025). Sementara itu, denda keterlambatan pembayaran dipandang sebagai riba jahiliyah karena adanya tambahan akibat penundaan pembayaran utang. Oleh sebab itu, sebagian ulama menyatakan bahwa PayLater tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam apabila masih menerapkan sistem bunga dan denda.

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh yang

menyatakan bahwa pemberi pinjaman tidak boleh mensyaratkan adanya tambahan dalam transaksi utang piutang. Fatwa tersebut menegaskan bahwa tambahan yang diperbolehkan hanyalah pemberian sukarela dari pihak peminjam dan bukan menjadi syarat dalam akad. Dengan demikian, sistem PayLater yang menetapkan bunga dan biaya tambahan secara wajib dipandang bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain persoalan riba, ulama juga menyoroti kemungkinan adanya unsur gharar dalam transaksi PayLater. Gharar terjadi apabila terdapat ketidakjelasan informasi mengenai biaya tambahan, bunga, maupun konsekuensi keterlambatan pembayaran (Hayati et al., 2025). Islam menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan akad agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, transaksi PayLater harus dilakukan secara terbuka dengan informasi yang jelas mengenai harga, cicilan, bunga, tenor, dan denda agar terhindar dari unsur gharar.

Dalam konteks transaksi syariah, penggunaan sistem pembayaran digital sebenarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, kejujuran, kerelaan, dan kemaslahatan. Sistem pembayaran berbasis teknologi dapat menjadi sarana kemudahan transaksi bagi masyarakat apabila tidak mengandung unsur riba, gharar, dan dzalim (Widodo & Haq, 2024). Oleh karena itu, beberapa ulama menawarkan konsep PayLater syariah yang menggunakan akad sesuai prinsip Islam tanpa bunga dan tanpa denda keterlambatan, sehingga transaksi tetap memberikan kemudahan namun tidak bertentangan dengan hukum Islam.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Perkembangan financial technology (fintech) di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam sistem transaksi keuangan masyarakat, khususnya melalui hadirnya layanan PayLater. Kemudahan akses, proses transaksi yang cepat, serta dukungan dari perkembangan e-commerce menjadikan PayLater semakin populer, terutama di kalangan generasi muda. Sistem “beli sekarang, bayar nanti” dianggap mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan secara instan tanpa harus melakukan pembayaran langsung pada saat transaksi.

Dalam praktiknya, PayLater bekerja melalui mekanisme pembayaran cicilan dengan tenor tertentu yang disertai bunga dan denda keterlambatan. Kemudahan tersebut di satu sisi memberikan manfaat bagi masyarakat, namun di sisi lain juga memunculkan dampak negatif berupa meningkatnya perilaku konsumtif dan budaya belanja instan. Pengguna cenderung terdorong membeli barang berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan, sehingga berpotensi menimbulkan masalah keuangan akibat penumpukan cicilan dan utang.

Berdasarkan perspektif ekonomi Islam, penggunaan PayLater perlu ditinjau dari aspek akad, riba, dan gharar. Secara akad, transaksi PayLater dinilai telah memenuhi unsur kesepakatan antara para pihak. Namun, keberadaan bunga dan denda keterlambatan dalam sistem PayLater dipandang mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam. Selain itu, kurangnya pemahaman pengguna terhadap biaya tambahan dan konsekuensi

pembayaran juga dapat menimbulkan unsur gharar dalam transaksi.

Pandangan ulama terhadap PayLater terbagi menjadi dua pendapat. Sebagian ulama memperbolehkan penggunaan PayLater selama memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan akad, transparansi, dan tidak adanya unsur penipuan. Akan tetapi, sebagian besar ulama berpendapat bahwa sistem PayLater yang menerapkan bunga dan denda keterlambatan tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung unsur riba. Oleh sebab itu, diperlukan sistem transaksi digital berbasis syariah yang mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam.

2. Saran

Pengguna layanan PayLater hendaknya lebih bijak dalam memanfaatkan fasilitas tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan finansial agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif dan utang yang berlebihan. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai hukum transaksi dalam Islam agar lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan digital.

Bagi perusahaan penyedia layanan PayLater, diharapkan dapat menghadirkan sistem pembayaran yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghapus unsur bunga dan denda yang memberatkan pengguna. Pemerintah dan lembaga terkait juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap layanan fintech agar mampu melindungi masyarakat dari risiko penyalahgunaan transaksi digital dan praktik yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., Harahap, M. I., Nurbaiti, N., & Rokan, M. K. (2023). The Factors Influencing Behavioural Intention Fintech Lending (Paylater) Among Generation Z Indonesian Muslims and Islamic Consumption Ethics Views. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 7(1), 01. <https://doi.org/10.30983/es.v7i1.6233>
- Cintya, P., & Nisa, F. L. (2024). Pandangan Proses Transaksi PayLater Terhadap Perilaku Konsumtif Dalam Prespektif Ekonomi Syariah. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(2), 152-162. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.115>
- Febriyanthi, P. W., Suarmanayasa, I. N., & Trianasari. (2025). The Effect Of Benefit Perception And Financial Literacy With Consumer Satisfaction As A Mediating Variable On Interest In Using Payment Systems Shopee Paylater. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 7(3). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v7i3.7844>
- Hayati, A. N., Fitrianoor, W., Saliro, S. S., Fadillah, N., & Pane, S. R. S. (2025). Reconstructing Paylater Schemes in Islamic Fintech: A Normative Analysis of Deferred Payment Contracts Under Sharia Economic Law. *Syariah: Jurnal*

Hukum Dan Pemikiran, 25(1), 175–193.

<https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i1.18517>

Julita, E., B. I., & Yustati, H. (2022a). Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2953–2957.

<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6775>

Julita, E., B. I., & Yustati, H. (2022b). Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2953–2957.

<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6775>

Julita, E., B. I., & Yustati, H. (2022c). Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2953–2957.

<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6775>

Koswara, A., Tarso, T., Soegoto, E. S., Wahdiniwaty, R., Bachtiar, A. M., & Sumitra, I. D. (2025). Persaingan PayLater di Indonesia: Analisis Pasar dan Peramalan Minat Konsumen Berbasis Data Science. *Jurnal Salingka Nagari*, 4(2), 254–270.

Maharani, H. H., & Darna, D. (2024). Analisis Keputusan Penggunaan PayLater Kredito Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen PNJ*, 5(1).

<https://prosiding.pnj.ac.id/index.php/SNAM/article/view/31>

99

Miranda, A., & Nuryana, I. (2026). Dampak kesenjangan literasi keuangan dan locus of control terhadap perilaku konsumtif pengguna paylater. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 14(1), 58-71.

<https://doi.org/10.26740/jupe.v14n1.p58-71>

Muslih, M., Redjeki, S., Firmansyah, G., & Larasati, A. (2025).

Analisis Multi-Dimensi Dampak Ekonomi, Perilaku Konsumsi, dan Risiko Sosial Penggunaan Paylater di Indonesia / Jurnal Impresi Indonesia.

<https://jii.rivierapublishing.id/index.php/jii/article/view/708>

3

Sari, D. A., Bafadhal, M. I., & Roihan, M. (2025). Pengaruh Kemudahan, Manfaat, Kredibilitas, Niat Berperilaku, dan Pengaruh Sosial Sistem Pembayaran Shopeepaylater terhadap Perilaku Konsumtif dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 6(1), 202-212.

Si, D. D. H., M., & karim M.E, F. A., S. E. I. (2022). *Ekonomi Mikro Islam*. Merdeka Kreasi Group.

Triyana, T., Asnaini, A., & Polindi, M. (2024). Analisis Perilaku Konsumtif Pengguna Layanan Buy Now Pay Later dalam Konsep Konsumsi Menurut Muhammad Abdul Mannan.

Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah), 7(2), 1445-1456. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1605>

Widodo, A. Z. Z., & Haq, F. (2024). Determinants of Shopee Paylater Usage Decisions with Financial Management Behavior A Moderating Variable. *Journal of Islamic Economic Scholar*, 5(2), 101-120. <https://doi.org/10.14421/jies.2024.5.2.101-120>